

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga membenarkan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Kedua landasan tersebut secara implisit menghendaki bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Menurut Muhammad sebagaimana dikutip oleh (Ferry 2010: 23), bahwa pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan fitrah hati nurani rakyat. Manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan bebas, sehingga agar kebebasan yang dimiliki manusia dapat dijalankan dengan baik, maka rakyat harus diperintah oleh rakyat. Kebebasan yang dimaksud disini bukanlah kebebasan yang tanpa batas, namun kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Komisi pemiliha umum merupakan garda terdepan dalam sebuah negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu, komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai peserta pemilu tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerinta dan masyarakat luas. (Moad, yeswanto, 2018:286)

Oleh karena itu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat.hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam mengkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepanya, dan didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika-dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politk, serta sosial dan kultural. Menurut subakti (handoyo,2013: 249) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah “keterlibatan masyarakat

dalam rangka mempengaruhi kebijakan public” Melihat hal tersebut perlu adanya penanganan serius dari pemerintah dalam menangani rendahnya partisipasi politik masyarakat dan generasi muda. Menurut Rusdi Kantaprawira (1996:64) pendidikan politik adalah sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai faham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus menjalankan tugas partisipasi.

Partisipasi politik adalah ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. dalam kehidupan bernegara tentunya istilah politik sudah tidak asing lagi di dengar. Pada dasarnya politik merupakan cara untuk merebut kekuasaan maupun mempertahankan kekuasaan. Menurut Miriam Budiharjo (2009:36) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Eko Handoyo, yaitu “aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil (*private citizen*) yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan public” (Handoyo, 2013: 49).

Dalam penyelenggaraan Pemilu di banyak negara, partisipasi politik sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir untuk memberikan suara mereka ditempat pemungutan suara. Tingkat partisipasi seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil Pemilu, karena akan menentukan orang-orang yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki jabatan tertentu. Pada konteks yang lain, partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak yang akan mewakili untuk memerintah dan menjadi perwakilan warga di legislatif. Partisipasi pemilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan.

Pemilihan umum merupakan Peranan terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintah secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bersekongkolnya kepentingan tertentu, di dalam tubuh, tertentu di dalam kepentingan tertentu, di dalam pemerintahan atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguas (Mukthie Fadjar, 2013 : 1).

Sosialisasi pemilu bagi masyarakat desa saat ini sangat penting terutama pada masyarakat pedesaan untuk itu perlu adanya transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan berbagai hal tentang pemilu seperti sistem, tahapan, dan lembaga penyelenggaranya. Tetapi lebih dari itu terkait juga dengan arti penting pemilu bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu muatan dalam sosialisasi pemilu sebagai bagian dari pendidikan pemilih harus dapat mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang utuh. Branson (1999:8-9) “Kompetensi kewarganegaraan adalah seperangkat pengetahuan, nilai dan sikap serta keterampilan yang mendukung menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. Kompetensi ini nantinya akan memberi bekal kepada setiap masyarakat yang memilih pada saat pemilihan presiden nantinya (pilpres). agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik (*be smart and good citizenship*).

Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu instrumen yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Tidaklah heran isu tinggi rendahnya angka partisipasi berkaitan dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan warga kepada wakil mereka atau orang yang diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan. Sebagai salah satu bagian dari keberlanjutan demokrasi, tingkat partisipasi pemilih juga akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan pemilihan umum dan

mengatur kehidupan banyak orang. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Huntington dan Nelson dalam bukunya partisipasi politik di negara berkembang memaknai partisipasi politik sebagai “kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.” Dalam definisi tersebut partisipasi politik lebih fokus pada kegiatan politik rakyat secara peribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh Pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan *lobbyist* profesional yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya. Dalam perspektif lain *McClosky* dalam *International Encyclopedia of the Social Science* menyatakan, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui makna mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dalam perspektif pengertian yang generik, Budiardjo memaknai partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi

kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu tentu memiliki tugas yang tidak ringan dalam mengatasi hal ini. Perlu berbagai upaya untuk mendekatkan pemilu kepada masyarakat, sehingga mereka bisa diajak untuk berperan aktif, bahkan bila memungkinkan akan meningkatkan rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pemilu, karena tidak terpenuhinya hak pilih. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja komisi pemilihan umum (KPU) belum optimal dalam memberikan akses dan hak pilih

Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai independen penyelenggaraan pemilu (Pito,2006:14). Sosialisasi pemilu sebagai proses pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan saat ini merupakan suatu kebutuhan dasar bagi pemilih pemula. Hal ini penting karena dengan kompetensi kewarganegaraan yang mapan pemilih pemula dapat mempertimbangkan sisi kualitas calon yang dipilih. Pembentukan dan pengembangan kompetensi dalam sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, mengajak pemilih pemula tidak hanya tau tentang bagaimana memilih, tetapi juga membangun kesadaran dan daya kritis terhadap setiap tahapan proses pemilu. Dengan demikian, pemilih pemula tidak lagi menjadi objek dalam pemilu, tetapi sebaliknya mereka bisa menjadi subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politik, sekaligus menjadi pendorong pendewasaan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat banyak, bukan kepentingan orang perorang, sehingga hal ini mampu menumbuhkan demokrasi di indonesia.

Upaya Komisi pemilihan Umum (KPU) untuk mengedukasi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu dapat dilakukan dengan pendidikan politik. Hal ini didasarkan pada salah satu tujuan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik. Menurut Zamroni (2013:

25) sosialisasi politik/pendidikan politik bertujuan agar warga negara memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, nilai, sikap dan orientasi politik, dan mampu berpartisipasi dalam politik, sehingga aktif memberi dukungan dan kelak bisa melanggengkan sistem politik yang dianut selama ini.

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) disini sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan politik atau sosialisasi politik bagi masyarakat khususnya pemilih pemula untuk menumbuhkan kesadaran politik. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Begitu juga dengan pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih.

Sosialisasi pemilu adalah proses pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan saat ini karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat pedesaan sebagai pemilih terutama masyarakat di Desa Nanga Kalan Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. Hal ini penting karena dengan kompetensi kewarganegaraan yang mapan sehingga masyarakat di Desa Nanga Kalan dapat mempertimbangkan sisi kualitas calon yang akan dipilihnya. Pembentukan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan dalam sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilihan akan mengajak masyarakat Desa nanga kalan tidak hanya tahu tentang bagaimana memilih, akan tetapi juga membangun kesadaran dan daya kritis terhadap setiap tahapan proses pemilu. Dengan begitu, masyarakat di Desa Nanga Kalan tidak lagi menjadi objek dalam pemilu, tetapi sebaliknya mereka bisa menjadi subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politik, sekaligus menjadi pendorong pendewasaan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat banyak, bukan kepentingan orang perorangan. Masyarakat desa Nanga Kalan harus terus dibentuk dan dikembangkan kompetensi kewarganegaraannya agar sadar bahwa pemilu adalah salah satu proses pembangunan demokrasi. Sikap saling menghormati,

toleran dan menghargai hak pilih orang lain harus dibangun dan diinternalisasikan dalam diri setiap individu sebagai calon pemilih. Kalah dan menang dalam pemilu adalah sesuatu yang wajar dan biasa, hal itu harus menjadi kesadaran bersama seluruh komponen masyarakat. Pemahaman masyarakat terdapat arti penting peran serta didalam politik sangatlah berpengaruh karena dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten melawi. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mengetahui siapa calon yang akan mereka pilih baik itu dari nama calon, visi-misi para calon.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan data dan informasi awal bahwa, tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala Desa maupun Kepala Daerah masih rendah setiap tahun. Hal ini didasarkan tingkat kesadaran politik masyarakat desa nanga kalan kecamatan ella hilir masih rendah itu dibuktikan dengan semakin menurunnya persentase pemilih.

Berikut tabel tingkat partisipasi politik masyarakat desa nanga kalan kecamatan ella hilir sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tingkat Partisipasi Politik Desa Nanga Kalam
Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi

TINGKAT PARTISIPASI POLITIK																
Desa Nanga Kalam	Jumlah Pemilih KPPS,PPS,TPS								Pengguna hak pilih							
	Dusun Kalan		Dusun Tanjung		Dusun Kilas		Dusun Engkabang		Dusun Kalan		Dusun Tanjung		Dusun Kilas		Dusun Engkabang	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Jumlah	44	59	55	50	117	82	75	67	55	49	57	46	107	77	84	65
	103		105		199		142		104		103		183		149	

Sumber : TPS Desa Nanga Kalam Kecamatan ella Hilir kabupaten melawi 2019

Berdasarkan data dalam tabel diatas, tingkat partisipasi masyarakat didesa nanga kalan kecamatan ella hilir kabupaten melawi belum optimal, hal ini ditandai dengan jumlah pemilih tercatat berjumlah 619 jiwa dan yang memilih sekitar 390 jiwa. dilain sisi tingkat partisipasi politik masyarakat desa nanga kalan sudah bisa dikatagorik sudah mengalami peningkatan dan

semakin membaik dari sebelumnya dan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah sekitar 62. Rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum seharusnya ditingkatkan dengan berbagai macam cara dan strategi yang tepat agar lebih baik kedepannya. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi politik dengan cara menumbuhkan kesadaran politik. Kesadaran politik dapat dibangun melalui sosialisasi politik dan pendidikan politik, seperti halnya yang diungkapkan oleh Michael Rush dan Philip. A (2011 : 22) bahwa yang dimaksud sosialisasi politik adalah “proses, oleh pengaruh dimana seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik”. Inti dari kesadaran politik adalah partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya dalam pemilihan umum yang salah satu indikatornya adalah kemelekan politik dalam masyarakat.

Indikator dari munculnya kesadaran masyarakat terhadap politik salah satunya adalah kurangnya pendidikan politik terhadap masyarakat dan secara sadar menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan hanya semata-mata karena uang. serta tumbuhnya sikap tanggung jawab, baik tanggung jawab akan pilihannya dalam pemilihan tersebut maupun tanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Nanga Kalan Kecamatan Hila Hilir”.

Di desa nanga kalan tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal, keadaan ini diperlihatkan dengan jumlah pemilih yang tidak semuanya menggunakan hak pilih. partisipasi Masyarakat di Desa nanga kalan dikatakan sebagai objek dalam kegiatan Partisipasi politik yaitu; mereka masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya kedepan dapat berperan dalam bidang politik dan sebagai generasi muda atau penerus bangsa masyarakat di Desa nanga kalan perlu memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas tentang ilmu politik termasuk

dalam kegiatan pemilihan presiden agar jangan sampai ada masyarakat yang tidak ikut serta dalam berpartisipasi (golput) pada saat pelaksanaan pemilihan presiden kedepannya.

Pemahaman terdapat arti penting peran serta politik masyarakat desa nanga kalan dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat desa nanga kalan. kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mengetahui siapa bakal calon yang harus mereka pilih baik itu dari nama calon, visi-misi para calon yang akan di pilih. Ini yang menjad masalah yang sangat berpengaruh terhadap partiipasi politik di desa nanga kalan, kecamatan ella hilir, kabupaten melawi.

B. Fokus Penelitian

Masalah Umum dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Di Desa Nanga Kalan Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. Sedangkan sub masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat Dalam Pemilihan Umum Di Desa Nanga Kalan Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi?
2. Bagaimana implementasi Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik di desa nanga kalan kecamatan ella hilir kabupaten melawi?
3. Faktor pendukung dan penghambat Komisi pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Dalam Di Desa Nanga Kalan Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan umum dalam Penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi secara obyektif tentang bagaimana Partisipasi Politik Pada Masyarakat di Desa nanga Kalan Kecamatan Ella hiir, Kabupaten Melawi.

2. Tujuan Khusus

Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk Mengetahui upaya KPU dalam mewujudkan partisipasi politik masyarakat desa nanga kalan kecamatan ella hilir kabupaten melawi
- b. Untuk Mengetahui Bentuk Kegiatan yang Dilakukan Oleh KPU Untuk Mengembangkan Karakter Masyarakat dalam partisipasi politik di desa nanga kalan kecamatan ella hilir kabupaten melawi.
- c. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat KPU dalam Mengembangkan partisipasi politik di desa nanga kalan kecamatan ella hilir kabupaten melawi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka dari itu penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan pemahaman bagi masyarakat menengah yang masih belum paham dengan partisipasi politik.
- b. Memberikan motivasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dengan baik dan supaya masyarakat bisa inovatif.
- c. Memberikan edukasi dan pendidikan politik tentang pentingnya peran masyarakat dalam pemilihan umum

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah menyediakan solusi terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian, manfaat yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian ini semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat memberikan solusi atau jawaban terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini, serta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, atau lembaga yang terkait.

Berikut manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti menambah wawasan serta pengetahuan mengenai strategi komisi pemilihan umum (KPU) Kota kabupaten melawi dalam pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik, selain dari pada itu juga diharapkan berguna di masa yang akan datang dan menjadi referensi untuk penelitian karya ilmiah lainnya.
- b. Bagi masyarakat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang politik guna untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu.
- c. Bagi Komisi pemilihan umum diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan masukan kepada KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Umum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel didefinisikan sebagai gejala yang bervariasi. Gejala adalah objek penelitian, sehingga variable adalah objek penelitian yang bervariasi. Dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel yaitu Peran Komisi pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:38).

Dari pengertian diatas yang dimaksud dengan variabel dalam penelitian ini adalah semua gejala yang muncul yang menjadi objek dari penelitian ii. Variabel dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel tunggal

Variabel tunggal adalah variabel yang merupakan suatu gejala yang diamati atau yang dideskripsi tanpa hubungan dengan gejala-gejala yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan

partisipasi politik masyarakat desa nanga kalan kecamatan ella hilir kabupaten melawi.dengan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, dengan indicator sebagai berikut:
 - 1) Pemberian Suara (Voting)
 - 2) Diskusi Politik
 - 3) Kegiatan Kampanye
 - 4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok Kepentingan
 - 5) Komunikasi individu dengan pejabat politik dan administratif
(Saleh, 2006:203)
- b. Implementasi Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Nanga Kalan, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi
 - 1) Melakukan Sosialisasi ke Masyarakat.
 - 2) Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga.
 - 3) Sosialisasi Melalui Media Sosial
 - 4) Melakukan Survei atau jejak Pendapat
 - 5) Peningkatan kinerja pemilu
(Sudijono Sastroatmodjo(2019:34)
- c. Faktor pendukung dan penghambat Peran Komisi pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Dalam Di Desa Nanga Kalan Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi, dengan Indikator Sebagai berikut:
 - 1) Faktor pendukung sebagai berikut:
 - a. Kesadaran politik
 - b. Sosok Bakal Calon/Figur Tokoh
 - c. Sosialisasi politik
 - d. Jumlah TPS dan Mudah Dijangkau
 - e. Faktor Sosiologis
 - f. Terbentuknya Antusiasme Masyarakat

- 2) Faktor penghambat sebagai berikut:
 - a. Rendahnya Kesadaran Pada Setiap Individu
 - b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Politik
 - c. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU
 - d. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

(Anggraini, 2019)

2. Depenisi Operasional

Depenisi operasional dimaksud untuk memperjelas variabel dan aspek yang akan dilakukan diteliti atau yang akan menjadi fokus penelitian agar tidak terjaidi kesalahanpahaman dalam mendefinisikanya. Deenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

a. Partisipasi politik

Politik adalah hal yang penting bagi suatu negara. Perlu adanya partisipasi politik dari seluruh masyarakat untuk dapat memajukan politik negara tersebut. Menurut Silvia Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa. Kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepetingan, mengadakan hubungandengan pejabat pemeriantah atau anggota parlemen dan sebagainya (mirriam Budiardjo, 1982:1)

b. Komisi pemilihan umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (UU RI No.22 Tahun 2007). Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan

lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945, (UU RI No. 22 Tahun 2007).

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat desa nanga kalan belum sepenuhnya meningkat dari yang sebelumnya, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti tentang pentingnya haknya sebagai masyarakat didalam pemilihan umum, ada beberapa faktor penyebab masyarakat desa nanga kalan kurang didalam memberikan hak pilih mereka kepada calon pemimpin, dari segi pendidikan politik, sosialisai politik, peran komisi pemilihan umum juga belum begitu optimal dikarenakan biaya didalam pelaksanaan pemilu tidak begitu memadai yang membuat gerak KPU kabupaten melawi masih terbatas. belum sepenuhnya sampai kepada seluruh lapisan masyarakat desa nanga kalan kabupaten melawi didalam melakukan sosialisasi maupun didalam memberikan pendidikan politik, faktor ekonomi masyarakat, pergaulan, perkembangan zaman apa lagi di era sekarang ini dimana media sosial sudah berkembang begituk pesat. walaupun masih ada beberapa masyarakat kurang didalam politik namun hali itu dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang partisipasi politik dan Minimnya Pendidikan masyarakat. Sehingga masyarakat kurang memahami dan tidak mengerti apa tugas dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik dan bisa menggunakan hak pilih untuk memilih dan memberikan hak suara mereka dengan baik dan tepat sasaran